

## Analisis Optimalisasi Keterbukaan Informasi Berbasis Website DPRD Kota Medan dalam Perspektif Manajemen Islam

Andri Soemitra<sup>1</sup>, Adila Khairani br Tambunan<sup>2</sup>  
Email: [andrisoemitra@uinsu.ac.id](mailto:andrisoemitra@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [dilatbn7@gmail.com](mailto:dilatbn7@gmail.com)<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

### Abstract

*Public information disclosure is an important aspect of good governance. Law No. 14 Year 2008 on Indonesian Public Information Disclosure limits the public's right to obtain information on public policies. As a regional legislative body, the Medan City Council is expected to optimise the use of information technology, especially websites, as a tool to provide information to the public. This research aims to analyse the use of DPRD's website in providing information to the public. This research uses descriptive qualitative method with interviews and observations. The results show that the Medan City DPRD website contains various information, such as meeting agendas, decisions, and activity reports. However, there are some shortcomings regarding data update and ease of access. The public has difficulty getting the latest information because some important documents are not updated regularly. In addition, the public is less engaged in providing comments or questions, despite the availability of the DPRD website. Many people are not aware of the interaction features available on the website, such as the discussion forum or complaints column. Public participation should be encouraged through digital platforms to increase public involvement in the decision-making process. This research recommends regular content updates, presentation of more interesting information, and public education on website features to increase engagement. From an Islamic management perspective, accountability and transparency are key to building public trust. The application of Islamic management principles such as tawhid, amanah, justice, transparency and responsibility is expected to improve the effectiveness of public services and strengthen the relationship between DPRD and the community. Optimisation of the website as a platform for interaction and delivery of clear and accurate information is essential to achieve these goals.*

**Keywords:** *Information Disclosure, Islamic Management, Transparency, Accountability, Public Participation.*

### Abstrak

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan publik. Sebagai lembaga legislatif daerah, Dewan Kota Medan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, terutama website, sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk menganalisis penggunaan website DPRD dalam memberikan informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa website DPRD Kota Medan berisi tentang berbagai informasi, seperti agenda rapat, keputusan, dan laporan kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan mengenai keterbaruan data dan kemudahan akses. Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkini karena beberapa dokumen penting tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, masyarakat kurang terlibat dalam memberikan komentar atau pertanyaan, meskipun situs DPRD tersedia. Banyak masyarakat yang tidak menyadari fitur interaksi yang

ada di website, seperti forum diskusi atau kolom pengaduan. Partisipasi masyarakat harus didorong melalui platform digital untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan konten rutin, penyajian informasi yang lebih menarik, serta edukasi masyarakat mengenai fitur website untuk meningkatkan keterlibatan. Dalam perspektif manajemen Islam, akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip manajemen Islam seperti tauhid, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat. Optimalisasi situs web sebagai platform interaksi dan penyampaian informasi yang jelas dan akurat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

**Kata Kunci: Keterbukaan Informasi, Manajemen Islam, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Publik**

## PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah. Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas. Dalam hal ini, al-Qur'an menegaskan (Q.2:42):

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya:*

42. Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya (Q.2:42).

Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik. Akuntabilitas dan transparansi adalah kriteria lainnya yang penting dalam suatu *good governance*. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Indonesia membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan publik. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tanggung jawab strategis untuk memberikan masyarakat informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Sebagai lembaga legislatif daerah, Dewan Kota Medan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, terutama website, sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Website DPRD tidak hanya membantu masyarakat berkomunikasi, tetapi juga membantu masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menggunakan websitenya dengan baik, DPRD dapat membantu pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat dan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 juga mengatur tentang pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan informasi publik.

Dalam perspektif manajemen Islam, mengajarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, keterbukaan informasi menjadi sangat penting dari sudut pandang manajemen Islam. Manajemen Islam menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan, termasuk dalam mengelola informasi publik (Al Kutsi & Kom, 2024). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua yang

tersedia di situs web DPRD Kota Medan tersedia secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip informasi manajemen Islam serta bermanfaat bagi masyarakat sebanyak mungkin perlu dilakukan semacamnya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."* Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong setiap individu untuk selalu mencari ilmu dan pengetahuan. Dalam konteks pemerintahan, informasi yang transparan akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Di Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, fenomena keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai kendala. Masyarakat sering kali merasa kesulitan untuk mengakses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan program-program yang dijalankan oleh DPRD. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta minimnya sosialisasi mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu, masih terdapat stigma bahwa informasi publik adalah hal yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga menghambat transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan.

Permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD dapat berujung pada apatisme politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi lembaga tersebut. Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi juga berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik.

Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mewakili suara rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Namun, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasinya, terutama di tingkat lokal seperti DPRD Kota Medan.

Pentingnya peran DPRD dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat adalah penerapan hukum Islam dalam pembangunan media nasional. Ini mencakup memberikan informasi yang sejalan dengan prinsip dan nilai Islam, seperti mempromosikan nilai-nilai Islam dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat adalah menjamin transparansi dan akuntabilitas tindakan pemerintah. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan serta memberi orang-orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, peran Humas Sekretariat DPRD dalam memberikan informasi kepada masyarakat berdasarkan syariat Islam sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah transparan dan akuntabel. Pembangunan media nasional memerlukan penerapan hukum Islam karena memberikan kerangka kerja untuk penyebaran informasi yang sejalan dengan prinsip dan nilai Islam.

Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mewakili suara rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Namun, meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasinya, terutama di tingkat lokal seperti DPRD Kota Medan.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, serta dukungan dari prinsip-prinsip manajemen Islam, optimisasi website DPRD Kota Medan dapat dilihat sebagai langkah penting untuk meningkatkan keterbukaan informasi, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana DPRD Kota Medan dapat mengoptimalkan website-nya yang dapat meningkatkan kualitas situs web mereka untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan akuntabel. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat di Kota Medan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik merujuk pada hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

1. Meningkatkan Transparansi: Keterbukaan informasi membantu mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau tindakan pemerintah.
2. Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan adanya informasi yang terbuka, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan keputusan yang diambil.
3. Mendorong Partisipasi Publik: Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis.

Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik

- a. Aksesibilitas: Informasi harus mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website resmi, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya.
- b. Relevansi: Informasi yang disediakan harus relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Keterjangkauan: Informasi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami dan tidak membebani masyarakat untuk mengaksesnya.

Adapun Strategi Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Website Resmi: Membangun dan mengelola website resmi yang informatif dan user-friendly, di mana masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan.

- 2) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka untuk mengakses informasi dan cara-cara untuk melakukannya.
- 3) Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan media sosial, untuk menyebarkan informasi secara lebih luas dan cepat.
- 4) Penyediaan Layanan Pengaduan: Menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan atau keluhan terkait informasi yang tidak tersedia atau sulit diakses.

Stakeholder memiliki peran dalam Keterbukaan Informasi Publik seperti:

- a) Pemerintah: Bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan kepada masyarakat.
- b) Masyarakat: Harus aktif dalam mencari informasi dan memberikan masukan kepada pemerintah.
- c) Media: Berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

### **Website**

Website adalah kumpulan halaman informasi yang saling terhubung, menggunakan konsep hyperlink untuk memudahkan navigasi pengguna. Elemen penting dari sebuah website meliputi desain antarmuka, konten, dan fungsionalitas. Desain antarmuka harus menarik dan intuitif agar pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan. Konten yang relevan dan berkualitas tinggi sangat penting untuk menarik pengunjung dan mempertahankan minat mereka. Selain itu, teknologi yang digunakan dalam pengembangan website, seperti HTML, CSS, dan JavaScript, berperan besar dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Penggunaan sistem manajemen konten (CMS) juga semakin populer, memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memperbarui konten tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

### **Manajemen Islami**

Manajemen Islami adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen yang selaras dengan ajaran Islam dalam setiap aspek organisasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Dalam konteks ini, manajemen tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan duniawi, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, etika, dan tanggung jawab sosial yang dituntut oleh ajaran Islam. Manajemen Islami adalah suatu pendekatan dalam manajemen yang berbasis pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta mengikuti petunjuk syariah dalam menjalankan aktivitas manajerial di dalam organisasi. Tujuannya adalah tidak hanya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah dengan menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika yang baik.

Manajemen Islami dilandasi oleh beberapa prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam organisasi, antara lain:

- a. Tawhid (Keesaan Allah): Prinsip tawhid mengajarkan bahwa segala aktivitas dalam kehidupan harus dilakukan dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan. Dalam konteks manajemen, ini berarti bahwa setiap

keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajer harus dilakukan dengan niat yang baik dan dalam kerangka mendekatkan diri kepada Allah.

- b. **Amana (Kepercayaan):** Seorang manajer atau pemimpin dalam organisasi harus menjaga amanah (kepercayaan) yang diberikan oleh Allah, yang tercermin dalam cara mereka memimpin dan mengelola sumber daya organisasi dengan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab.
- c. **Tanggung Jawab Sosial:** Manajemen Islami menekankan pentingnya berbagi kekayaan dengan masyarakat dan memperhatikan kepentingan sosial. Organisasi yang beroperasi di bawah prinsip manajemen Islami tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- d. **Keadilan:** Prinsip keadilan mengharuskan pemimpin dalam organisasi untuk memperlakukan semua anggota dengan adil, tanpa diskriminasi, serta memberikan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. **Bersyukur dan Bersabar:** Manajemen Islami mendorong individu untuk selalu bersyukur atas apa yang ada dan bersabar dalam menghadapi tantangan. Dalam konteks manajemen, ini berarti memimpin dengan bijaksana dan penuh ketenangan, serta memiliki daya tahan terhadap tekanan dan hambatan yang mungkin dihadapi.

Etika dalam manajemen Islami berhubungan erat dengan moralitas dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa etika yang diharapkan dalam manajemen Islami adalah:

- 1) **Kejujuran:** Kejujuran merupakan nilai dasar dalam manajemen Islami. Pemimpin dan karyawan diharapkan untuk selalu jujur dalam setiap transaksi dan keputusan.
- 2) **Tidak Menipu:** Islam melarang penipuan dalam segala bentuknya, baik itu dalam kontrak, transaksi, atau komunikasi.
- 3) **Menghindari Riba:** Dalam manajemen Islami, transaksi yang melibatkan riba (bunga) harus dihindari karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Organisasi diharapkan untuk bersikap transparan dalam pengelolaan keuangan dan segala aspek lainnya, serta dapat dipertanggungjawabkan.

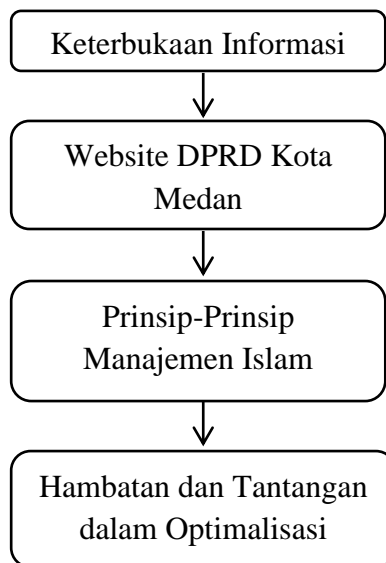
## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena keterbukaan informasi berbasis website DPRD Kota Medan dalam perspektif manajemen Islam. Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen Islami dalam optimalisasi keterbukaan informasi website DPRD Kota Medan?
- 2. Apa saja tantangan dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi melalui website DPRD Kota Medan dengan pendekatan manajemen Islami?
- 3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi di website DPRD Kota Medan dapat mencerminkan prinsip musyawarah dalam Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat optimalisasi website DPRD Kota Medan dalam perspektif manajemen Islam, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan partisipasi masyarakat dalam optimalisasi keterbukaan informasi berbasis

website sesuai dengan prinsip manajemen islam serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengelola website DPRD Kota Medan sesuai dengan nilai-nilai islam. Sampel penelitian ini adalah anggota DPRD, staf administrasi, dan pengguna website. Data akan dikumpulkan dari dua sumber yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dengan anggota DPRD, staf administrasi, dan pengguna website (masyarakat). Observasi yaitu mengamati interaksi masyarakat melalui website DPRD dan bagaimana mereka menggunakan informasi yang tersedia. Pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif agar dapat memberi gambaran fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan ketika proses magang selama satu bulan di Kantor DPRD Kota Medan. Berikut kerangka konsep penelitian ini:



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual**

Penjelasan:

- a. Keterbukaan Informasi menjadi fokus utama yang dianalisis dalam penelitian ini, dengan website DPRD Kota Medan sebagai alat untuk meningkatkan keterbukaan tersebut.
- b. Website DPRD Kota Medan merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik. Website ini harus dapat mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang menjadi bagian dari manajemen Islam.
- c. Manajemen Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu, seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang menjadi acuan dalam menilai bagaimana keterbukaan informasi ini seharusnya dioptimalkan.
- d. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengoptimalan keterbukaan informasi, baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun regulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap keterbukaan informasi yang disediakan oleh website DPRD Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota DPRD, staf administrasi, serta pengguna website. Selain itu,

kami juga melakukan analisis konten terhadap informasi yang tersedia di website tersebut seperti bagaimana ketersediaan informasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa website DPRD Kota Medan menyediakan berbagai informasi, termasuk agenda rapat, laporan kegiatan, dan dokumen anggaran. Namun, tidak semua informasi yang diharapkan oleh masyarakat tersedia secara lengkap dan terupdate. Aksesibilitas, hasil menunjukkan bahwa pengguna website mengungkapkan bahwa meskipun website tersebut dapat diakses, navigasi yang kurang intuitif menjadi kendala. Beberapa pengguna mengalami kesulitan dalam menemukan informasi yang mereka butuhkan. Interaksi dengan publik, hasil menunjukkan bahwa terdapat fitur untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan, namun respon dari pihak DPRD terhadap masukan tersebut masih minim. Hal ini menunjukkan kurangnya interaksi yang aktif antara DPRD dan masyarakat. Kemudian kualitas informasi, hasil menunjukkan bahwa Informasi yang disajikan cenderung bersifat formal dan kurang menarik bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk mengakses informasi yang disediakan. Proses wawancara juga membahas mengenai keterbukaan informasi dalam perspektif manajemen islami. Para narasumber setuju dengan perspektif manajemen islami, dimana mereka sangat mendukung dengan prinsip-prinsip manajemen islami yaitu tauhid, transparansi, amanah, akuntabilitas, aksesibilitas, tanggung jawab, keadilan serta keamanan dan perlindungan.

### **Pembahasan**

Hasilnya menunjukkan bahwa website DPRD Kota Medan berisi tentang berbagai informasi, seperti agenda rapat, keputusan, dan laporan kegiatan. Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan mengenai keterbaruan data dan kemudahan akses. Masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkini karena beberapa dokumen penting tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, masyarakat kurang terlibat dalam memberikan komentar atau pertanyaan, meskipun situs DPRD tersedia. Banyak masyarakat yang tidak menyadari fitur interaksi yang ada di website, seperti forum diskusi atau kolom pengaduan. Meski sudah ada langkah-langkah pengamanan untuk data yang tersimpan di website, namun masih ada kebutuhan untuk memperkuat sistem keamanan guna menjaga informasi sensitif dan mencegah kebocoran data pribadi.

Dari analisis dokumen, ditemukan bahwa meskipun DPRD telah menyediakan laporan tahunan dan informasi anggaran, tidak semua informasi tersebut disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas DPRD. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi, DPRD Kota Medan perlu melakukan pembaruan rutin terhadap konten website. Informasi yang relevan harus selalu diperbarui agar masyarakat dapat mengakses data terkini. Selain itu, penyajian informasi dalam format yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti infografis atau video, dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi website.

Penting bagi DPRD untuk mengedukasi masyarakat mengenai keberadaan website dan fitur-fitur interaktif yang ada di dalamnya. Kampanye sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, mengadakan webinar atau forum diskusi online yang melibatkan anggota DPRD dan masyarakat dapat mendorong interaksi yang lebih aktif. Dalam perspektif manajemen Islam, akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD perlu memastikan bahwa semua



informasi yang disajikan di website dapat dipertanggungjawabkan. Ini termasuk menjelaskan sumber data dan metodologi yang digunakan dalam laporan anggaran serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik terhadap laporan tersebut. Mengacu pada prinsip-prinsip manajemen Islam, keterbukaan informasi harus dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral. DPRD perlu membangun budaya transparansi dan kejujuran dalam setiap aspek komunikasi dengan publik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga sebagai wakil rakyat. Optimalisasi website dengan fokus pada pembaruan konten, peningkatan partisipasi publik, dan akuntabilitas informasi sangat penting untuk mencapai tujuan manajemen Islam yang berlandaskan transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Manajemen Islam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Website DPRD seharusnya tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai platform untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Misalnya, dengan mengadakan forum diskusi online atau survei untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai kebijakan yang akan diambil. Dalam Islam, penyampaian informasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, DPRD perlu memperhatikan kualitas informasi yang disajikan di website. Informasi harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami, serta dilengkapi dengan visualisasi data yang menarik. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami informasi yang disampaikan.

Dari segi perspektif manajemen Islam, optimalisasi keterbukaan informasi berbasis website di DPRD Kota Medan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berorientasi pada nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip manajemen Islam dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. Beberapa prinsip manajemen Islam yang relevan untuk diterapkan adalah:

1) Tauhid

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala aktivitas, termasuk dalam pengelolaan informasi publik, harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan demi memperoleh ridha Allah. Dalam konteks ini, setiap langkah yang diambil oleh DPRD Kota Medan dalam mengelola website harus dilandasi oleh niat untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, tanpa ada kepentingan tersembunyi atau manipulasi informasi.

2) Amanah

Manajemen Islam menekankan pentingnya menjaga amanah atau kepercayaan. Dalam hal ini, website DPRD Kota Medan berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Pemimpin dan pengelola website DPRD harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, bebas dari manipulasi atau distorsi.

3) Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting dalam manajemen Islam. Dalam konteks keterbukaan informasi, keadilan berarti memberikan akses yang sama bagi seluruh warga Kota Medan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Ini mencakup penyajian informasi yang jelas, mudah diakses, dan terbuka bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Keadilan juga mencakup transparansi dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan yang diambil oleh DPRD Kota Medan.

4) Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut prinsip manajemen Islam, pengelolaan organisasi harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Bagi DPRD Kota Medan, ini berarti bahwa seluruh kegiatan dan keputusan yang diambil oleh anggota dewan harus dapat dilihat dan dipahami oleh masyarakat. Pengelolaan website yang baik harus dapat menjamin keterbukaan informasi mengenai kebijakan, anggaran, serta hasil rapat atau diskusi yang dilakukan oleh DPRD.

5) Tanggung jawab

Manajemen Islami mendorong agar setiap keputusan dan tindakan dalam organisasi mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks website DPRD Kota Medan, ini berarti website harus berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi tetapi juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Interaksi yang lebih aktif antara anggota dewan dan masyarakat melalui fitur-fitur website yang memungkinkan feedback, kritik, dan saran akan meningkatkan keberlanjutan komunikasi yang lebih baik.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, penerapan prinsip-prinsip manajemen Islam seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan akan membantu DPRD Kota Medan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip tanggung jawab sosial juga akan memperkuat hubungan antara anggota dewan dan publik, serta memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan melalui website sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak berpihak.

### **Kesimpulan**

Optimalisasi keterbukaan informasi berbasis website DPRD Kota Medan dalam perspektif manajemen Islam merupakan langkah strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta kegiatan publik. Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, dimana DPRD harus memastikan bahwa semua informasi terkait anggaran, proyek, dan keputusan politik disebarluaskan secara terbuka melalui website resmi. Selain itu, penerapan teknologi informasi ini juga meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan akses langsung ke data dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas legislatif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.

Prinsip-prinsip manajemen Islam, seperti keadilan, harus menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya manusia di DPRD. Keadilan dalam alokasi anggaran dan mendistribusikan informasi penting untuk memastikan semua kalangan masyarakat mendapatkan akses yang setara. Selain itu, pegawai DPRD perlu memiliki integritas tinggi dan menerapkan etika kerja yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai seperti riba dan disiplin (gharar). Untuk mendukung hal ini, perlu ada program pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar mereka memahami prinsip-prinsip manajemen Islam dengan lebih baik.

Implementasi desentralisasi data melalui website juga dapat memfasilitasi aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, DPRD Kota Medan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap penerapan keterbukaan informasi ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip manajemen Islam tetap diutamakan. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum diskusi online maupun offline juga sangat dianjurkan, guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Dengan demikian, optimalisasi

keterbukaan informasi berbasis website DPRD Kota Medan dapat menjadi model yang efektif dalam memperkuat integritas dan transparansi pemerintahan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (Eds. ). (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.
- Dafindri, P. (2023). *Peran Humas Sekretariat DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Kota Surabaya. (The Role of Public Relations of the DPRD Secretariat in Absorbing the Aspirations of the People of Surabaya City)* . (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Gora, R., & S Sos, M. M. (2019). *Riset kualitatif public relations*. Jakad Media Publishing.
- Habib, M., Sihombing, U. M., Rahmadani, U., & Wirahayu, W. (2023). Pentingnya Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan Islam. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(2), 269–275. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i2.100>
- Jaelani, D. I. (2019). Manajemen Public Relations (Humas) Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al Quran dan Hadits. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 57. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v3i2.1501>
- Kriyantono, R. (2021). *Baest Practice Humas (Public Relations) Bisnis Dan Pemerintah: Manajemen Humas, Teknik Produksi Media Publisitas dan Public Relations Writing*. Prenada Media.
- Sulvinajayanti, S. (2018). PRAKTIK PUBLIC RELATION DALAM PANDANGAN ISLAM. *KOMUNIDA : MEDIA KOMUNIKASI DAN DAKWAH*, 8(2), 134–154. <https://doi.org/10.35905/komunida.v8i2.628>
- Triana, C. C., Yulianti, A., Nuraeni, L. A., & Sayyidah, A. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Diri Seorang Public relation dalam Berkomunikasi. *Cebong Journal*, 1(2), 34–40. <https://doi.org/10.35335/cebong.v1i2.13>